



Indonesia  
For Global Justice

## BRIEFING PAPER

---

Februari 2021

# HENTIKAN MONOPOLI HAKI TERHADAP COVID19, LAKSANAKAN TRIPS WAIVER

DIPUBLIKASIKAN OLEH :

**INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE**

Jl.Duren Tiga Raya No.9, Pancoran, Jakarta Selatan

Email : [igj@igj.or.id](mailto:igj@igj.or.id)

Website : [www.igj.or.id](http://www.igj.or.id)





## MONOPOLI HAKI & KOMERSIALISASI SEKTOR PUBLIK<sup>1</sup>

Disusun oleh:

Rachmi Hertanti, SH., MH.<sup>2</sup>

Agung Prakoso<sup>3</sup>

1. Tulisan ini disusun dari beberapa publikasi IGJ sebelumnya, termasuk paparan para narasumber dalam Webinar yang diselenggarakan oleh IGJ terkait dengan isu Monopoli Pengetahuan dan Diplomasi Vaksin tahun 2020.
2. Direktur Eksekutif IGJ
3. Staf Riset & Advokasi IGJ untuk isu IP Monopoly

### PENDAHULUAN

Ketentuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah mendorong praktek monopoli pengetahuan yang dikontrol penuh oleh industri farmasi di negara maju. Inilah bentuk penyalahgunaan (*abuse*) perlindungan HAKI oleh Korporasi yang menggunakan Hukum HAKI untuk menghalangi agar orang lain tidak memproduksi dan memperdagangkan produk yang teknologinya dimintakan perlindungan dalam upaya untuk tetap menjaga keuntungan tetap berada ditangan pemegang hak.

Di dalam isu kesehatan dan akses obat, perlindungan hak Paten akan menimbulkan ketidakpastian dan peningkatan biaya, menunda persaingan dan menjaga harga tetap tinggi untuk negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan pada

akhirnya menghalangi akses masyarakat kepada obat-obatan, alat-alat kesehatan, termasuk vaksin, yang dibutuhkan oleh publik secara luas penting khususnya ditengah situasi pandemi.

Monopoli dalam hak paten tentu harus ditantang dengan persaingan sehingga produksi bisa dilakukan dengan skala yang lebih besar dan luas dalam rangka menghasilkan harga yang lebih murah dan terjangkau. Dengan hak paten tentu tidak akan ada perusahaan lain yang bisa memproduksi secara generik. Pada akhirnya Monopoli HAKI disektor kesehatan akan mendorong komersialisasi secara terbuka terhadap kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat.

IGJ

Indonesia  
Untuk  
Keadilan  
GlobalIndonesia  
For  
Global  
Justice

## Perlindungan HAKI Sebagai Komoditas Bisnis

Sejak awal virus Corona ditetapkan sebagai Pandemi, hambatan mengenai akses obat, APD, dan treatment diyakini akan menjadi tantangan serius. Beberapa negara berkembang di awal pandemi mengalami kekurangan stok APD bahkan hingga kini kekurangan ventilator (alat bantu pernapasan) yang dibutuhkan untuk menyelamatkan penderita COVID masih menjadi ancaman serius.

Dalam penanganan covid-19, hampir semua terkait dengan persoalan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Bahwa hampir seluruh Produk kesehatan dalam penanganan Covid-19 seperti tes kit, diagnostik, masker, obat-obatan, vaksin, dan ventilator dilindungi dalam hak paten, rahasia dagang, dan desain industri. Inilah yang pada akhirnya membuka peluang bagi industri farmasi mengambil kesempatan dalam situasi pandemic untuk menarik sebanyak-banyaknya keuntungan dari penyalahgunaan perlindungan HAKI dan mendorong praktek monopoli pengetahuan, produksi, harga, dan distribusi (pasokan). Korporasi farmasi masih menggunakan pendekatan skema bisnis as usual dalam merespon kebutuhan penanganan pandemik di dunia.

## Nasionalisme Vaksin & Dampak Terhadap Ketimpangan Akses Vaksin

Saat angka kasus semakin melonjak tajam, negara harus bertahan dengan sekuat tenaga hingga vaksin ditemukan. Vaksin diyakini menjadi salah satu cara untuk menempuh imunitas global. Berbagai perusahaan farmasi, yang didukung oleh pendanaan negara maju, berlomba untuk dapat menemukan vaksin yang ampuh dan memproduksinya untuk menghadapi

Gambar 1  
Perlindungan HAKI Terkait Penangan Covid19

Produk kesehatan	Jenis HKI
Tes kit, diagnostik	Hak paten, rahasia dagang
Masker (terutama N95 resoirator)	Paten, desain industri
Obat-obatan	Paten
vaksin	Paten, rahasia dagang
ventilator	Paten, rahasia dagang, desain industri, hak cipta dan lainnya
Ventilator – katup ventilator, program, mesin, software, dll	<a href="https://www.medicaldevice-network.com/news/3d-printed-valves-covid-19-italy/">https://www.medicaldevice-network.com/news/3d-printed-valves-covid-19-italy/</a>
Artificial intellegent	

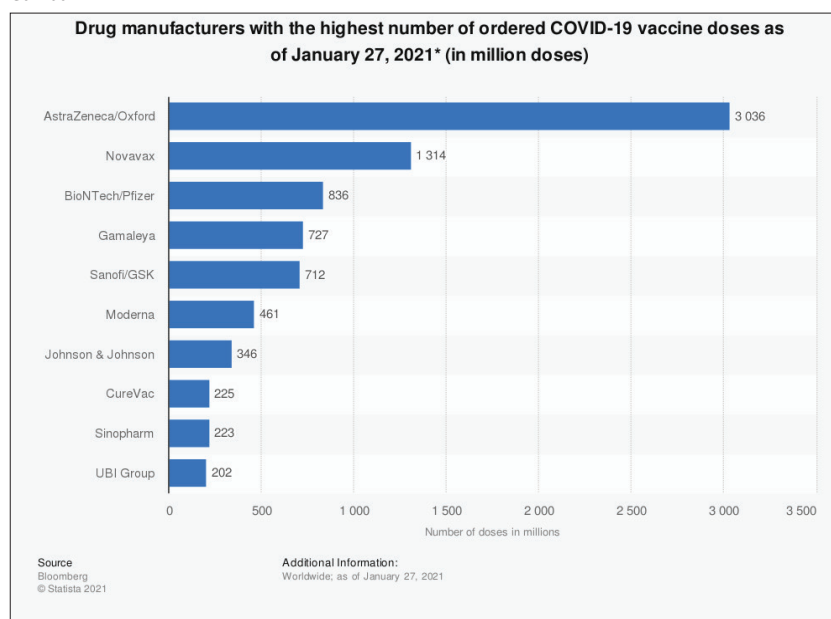
Sumber: Presentasi Lutfiyah Hanim, TWN, 2020.

ISSUE 1

# MONOPOLY KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID19

pandemik covid19, seperti Pfizer, Moderna, Jhonson & Jhonson, Sinopharm, dan sebagainya (*Lihat Gambar 2*). Termasuk, upaya pada level nasional seperti Indonesia, dengan vaksin merah putih. Perlombaan dalam menemukan vaksin yang efektif tentu dapat membuka celah besar bisnis di sektor kesehatan. Namun sebenarnya, perusahaan farmasi besar menunjukkan sedikit minat dalam perlombaan untuk mendapatkan vaksin. Hal ini karena, dari pengalaman masa lalu, membuat vaksin di, terutama pada keadaan darurat kesehatan yang akut, belum terbukti menguntungkan. Proses penemuan membutuhkan waktu dan jauh dari kepastian. Apalagi negara-negara miskin membutuhkan pasokan besar tetapi tidak mampu membeli harga tinggi.

Gambar 2



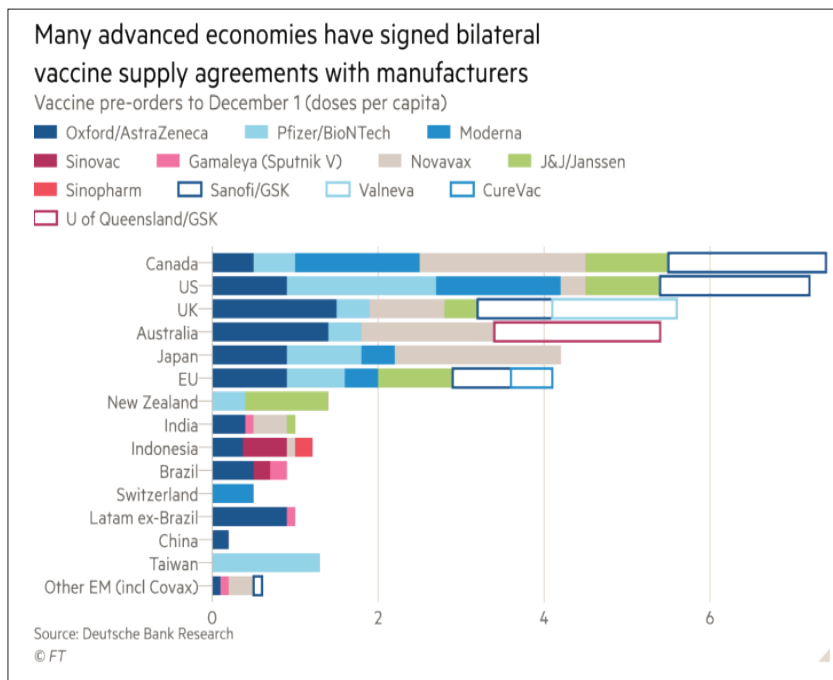
Sumber: <https://www.statista.com/topics/6172/coronavirus-covid-19-vaccines-and-treatments/>

Dan vaksin biasanya perlu diberikan hanya sekali atau dua kali. Hanya ketika pemerintah dan badan-badan internasional turun tangan dengan janji pendanaan, barulah mereka bisa mengerjakannya. Pemerintah dan organisasi multilateral telah berjanji untuk membeli miliaran dosis dengan harga yang ditentukan. Tentu, perusahaan farmasi yang menjual ke negara-negara kaya akan dapat mulai melihat pengembalian investasi mereka.<sup>4</sup> Dengan pendekatan pasar semacam inilah yang kemudian menimbulkan ketidakadilan akses, khususnya kepada negara berkembang dan miskin, terhadap obat-obatan yang

4. <https://www.bbc.com/news/business-55170756> Direktur Eksekutif IGJ

dibutuhkan untuk menangani pandemic covid19. Negara-negara kaya yang mampu mendanai pembuatan vaksin yang kemudian mendapatkan prioritas pasokan vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi besar atas dasar kesepakatan bisnis bilateral (bilateral deals). Praktek ini dikenal dengan istilah nasionalisme vaksin (*Lihat Gambar 3*).

Gambar 3



Sumber: diunduh dari <https://www.ft.com/content/3a37c3f5-20fc-4d1f-8dd4-2fd966c27542>

Padahal untuk memutus mata rantai pandemi, semua negara harus mendapat jatah vaksin terutama di negara-negara yang rentan. Tanpa akses yang merata maka imunitas global akan sulit tercapai. Dampak dari kesepakatan bilateral antara pemerintah yang lebih kaya dengan produsen vaksin virus corona (baca: nasionalisme vaksin) telah menimbulkan kekhawatiran atas kenaikan harga dan kurangnya pasokan untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Disinilah ruang bagi perusahaan farmasi besar untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan keuntungan dari permainan harga. Januari 2021 yang lalu, The Guardian memberitakan isu ketidakadilan harga vaksin yang dialami Afrika Selatan. Dalam artikelnya disebutkan bahwa Afrika Selatan membayar harga vaksin 2,5 kali lebih mahal dari Uni Eropa. Afrika Selatan telah memesan vaksin sebanyak 1,5 juta dosis kepada Serum Institute of India (SII) dengan harga per dosisnya sekitar 4,32 Euro, yang jika dibandingkan dengan harga per dosis

yang diperoleh Uni Eropa yang hanya berkisar 1,78 Euro. Bahkan, rendahnya harga yang diperoleh Uni Eropa ketimbang Afrika Selatan diklaim karena Uni Eropa telah berinvestasi dalam kegiatan penelitian dan pengembangan vaksin, sehingga harganya didiskon.<sup>5</sup>

### Buka Transparansi

Perbedaan harga dalam kesepakatan bilateral muncul akibat perlindungan rahasia dagang yang digunakan perusahaan farmasi dengan negara. Hal ini membuat tertutupnya seluruh informasi yang dibutuhkan publik, seperti harga yang diberikan, jumlah pasokan, termasuk jadwal pengiriman. Isu transparansi terkait dengan kesepakatan bilateral yang dilakukan oleh perusahaan farmasi telah menjadi tuntutan yang didesak oleh publik diseluruh dunia.

Ketimpangan akses akibat praktek nasionalisme vaksin semakin nyata dan akan berdampak terhadap pasokan vaksin untuk negara berkembang dan miskin. Hal ini terbukti ketika Uni Eropa berencana melakukan pembatasan ekspor terkait dengan vaksin ke negara diluar Uni Eropa oleh perusahaan farmasi. Uni Eropa akan mewajibkan perusahaan farmasi seperti Pfizer dan Astrazeneca untuk mendaftarkan ekspor vaksin mereka dari wilayah Uni Eropa. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi vaksin oleh kedua perusahaan farmasi tersebut tetap memprioritaskan kebutuhan Uni Eropa yang sebelumnya telah memesan dan membayar jutaan dosis.<sup>6</sup>

Kebijakan tersebut diatas diambil oleh Uni Eropa atas peristiwa keterlambatan Pfizer dan AstraZeneca dalam memasok vaksin untuk seluruh anggotanya dari waktu yang telah ditetapkan. Bahkan, Italia berencana akan mengambil langkah hukum kepada Pfizer dan Astrazeneca atas keterlambatan pasokan vaksin. Namun, apa yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai negara kaya hanya akan menghambat pemenuhan pasokan vaksin yang juga sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang dan miskin.

### Kontrol Produksi Perusahaan Farmasi

Aturan perlindungan HAKI memberikan hak monopoli pada perusahaan farmasi untuk mengatur produksi, distribusi, hingga menentukan

5. <https://www.theguardian.com/world/2021/jan/22/south-africa-paying-more-than-double-eu-price-for-oxford-astrazeneca-vaccine>

6. [https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-eu-vaccineexport/eu-to-monitor-vaccine-exports-but-says-its-not-a-ban-idUSKBN29V100?fbclid=IwAR3UNs\\_03b0Ra3k9EM9Q6xvVf47GbFW-1YMQ92B9RCzKFSMQGk\\_RruzUp-4](https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-eu-vaccineexport/eu-to-monitor-vaccine-exports-but-says-its-not-a-ban-idUSKBN29V100?fbclid=IwAR3UNs_03b0Ra3k9EM9Q6xvVf47GbFW-1YMQ92B9RCzKFSMQGk_RruzUp-4)



harga dalam rangka menumpuk keuntungannya. Oleh karena itu, perusahaan farmasi besar yang berhasil mengembangkan vaksin tentu akan membuat penemuannya itu dijamin perlindungannya, baik dengan hak paten, desain industri, maupun rahasia dagang.

Dalam konteks kontrol harga vaksin, ada pandangan bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan farmasi dari penjualan vaksin akan bersifat sementara. Walaupun perusahaan farmasi tersebut enggan berbagi kekayaan intelektualnya. Hal ini karena, sudah ada lebih dari 50 vaksin dalam uji klinis di seluruh dunia, dan dalam waktu dua tahun, mungkin akan ada 20 vaksin di pasaran. Oleh karena itu, akan sulit bagi perusahaan farmasi untuk menetapkan harga premium.<sup>7</sup>

Hal inilah yang kemudian mendorong perlombaan perusahaan farmasi untuk dapat segera menuntaskan uji klinis, walaupun sering kali terjadi klaim sepihak dari perusahaan farmasi yang berlomba untuk mengatakan bahwa vaksin temuannya sudah memiliki efektivitas hingga 90%. Tentu ini menjadi bagian dari upaya mereka dalam merebut pasar vaksin yang sangat besar. Tentu perusahaan farmasi besar tidak mau kehilangan haknya untuk tetap dapat melakukan kontrol terhadap produksi dan harga. Peristiwa keterlambatan pasokan yang terjadi pada Uni Eropa seharusnya menjadi momentum kuat bagi publik untuk memprotes praktek business as usual yang digunakan oleh Perusahaan Farmasi dan negara maju ditengah isu kemanusiaan hari ini. Salah satu alasan yang diungkapkan Astrazeneca atas keterlambatan pasokan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di Uni Eropa adalah karena output produksi yang lebih rendah dari yang diharapkan di lokasi manufaktur dalam rantai pasokan Eropa. Hal ini karena vaksin adalah produk biologis yang kompleks, dimana proses produksinya tidak selalu menghasilkan jumlah vaksin yang dapat digunakan yang sama. Mengenai kapasitas produksi ini tentu menjadi tantangan dalam memenuhi permintaan dunia atas vaksin covid-19.<sup>8</sup>

Untuk dapat mengirimkan miliaran vaksin ke dunia, tentu kapasitas produksinya harus besar. Sementara saat ini, permintaan vaksin COVID-19 jauh lebih tinggi daripada pasokannya. Inilah tantangannya. Keterbatasan pasokan akan berdampak pada banyak negara, khususnya negara berkembang dan miskin, tidak akan memiliki akses yang luas ke vaksin pada tahun 2021. Ketidakpastian pasokan produksi akan mendorong tindakan proteksionisme vaksin dalam rangka memastikan kebutuhan dalam negerinya saja. Tentu, pendekatan business as usual dengan melakukan monopoli tidak akan mungkin bisa menyelesaikan pandemic covid19. Dibutuhkan komitmen kuat dari Pfizer atau Astrazeneca, termasuk

7. <https://www.bbc.com/news/business-55170756>
8. <https://theconversation.com/covid-vaccine-supply-is-causing-an-eu-crisis-so-whats-being-done-to-speed-up-production-154153>

perusahaan farmasi besar lainnya untuk membuka kesempatan bagi negara atau produsen lain untuk memproduksi vaksinnya. Tentu, berbagi kekayaan intelektual menjadi kuncinya.

### **Pertanyaannya, apakah perusahaan farmasi besar mau secara sukarela berbagi pengetahuannya ?**

Terkait hal ini, organisasi Dokter Lintas Batas (Medicines Sans Frontiers/ MSF) melaporkan bahwa perusahaan farmasi secara kolektif telah memutuskan untuk tidak terlibat dengan inisiatif Pool Akses Teknologi (C-TAP) COVID-19 WHO yang mendorong adanya kontribusi sukarela IP, teknologi, dan data untuk mendukung pembagian manfaat secara global dan peningkatan skala produksi serta pasokan COVID- 19 produk medis.<sup>(9)</sup>

*Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator* adalah inisiatif kolaborasi global untuk mempercepat pengembangan produksi dan akses yang berkeadilan untuk Covid test kit, treatment, dan juga vaksin. Terdapat beberapa pihak yang terlibat, diantaranya WHO, Gavi, CEF, Unitaaid, Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome, World Bank, The Global Fund, dan Find. Khusus untuk vaksin, dibahas dalam satu pilar yang bernama *The Covid-19 Technology Access Poll (CTAP)*. CTAP sebagai satu wadah untuk berbagi secara sukarela membagikan pengetahuan, kekayaan intelektual, dan data terkait teknologi kesehatan COVID-19.<sup>(10)</sup>

Kontrol perusahaan farmasi atas produksi vaksin pun tidak bisa dilepaskan dari praktek lisensi yang kerap dilakukan ditengah pandemi. Menurut MSF, perusahaan pemegang perlindungan HaKI dapat menerapkan persyaratan lisensi kepada produsen lain yang diberikan lisensi, seperti membatasi pasokan pada cakupan geografis yang terbatas dan kondisi lain yang membatasi manfaat persaingan dan pasokan global.

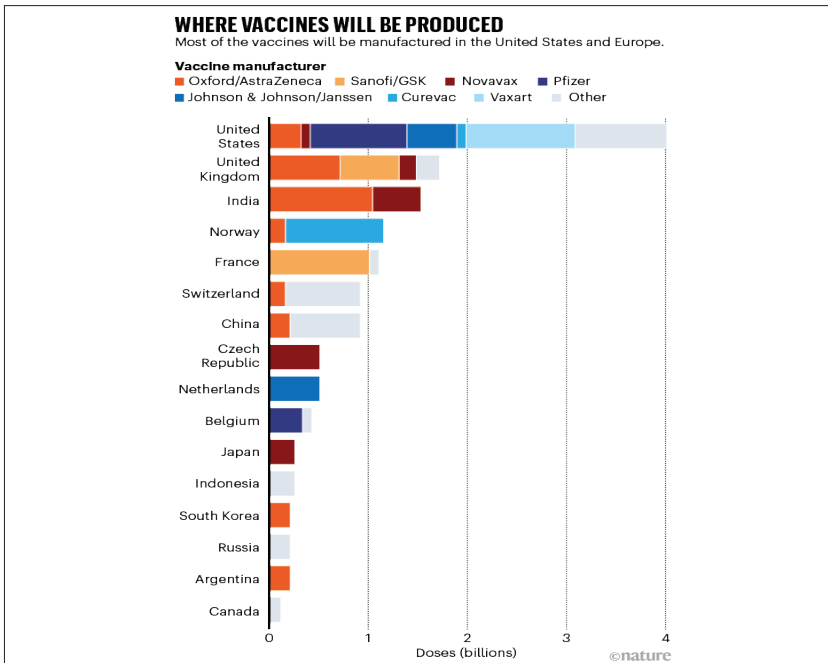
Tentu, praktek lisensi ini dilakukan dengan sebuah perjanjian yang sifatnya sangat rahasia. Misalnya saja, AstraZeneca telah menandatangani perjanjian lisensi yang memfasilitasi transfer teknologi pada *COVISHIELD* - salah satu kandidat vaksin pertama yang mencapai fase III - dengan produsen di Argentina, Brasil, Cina, India, dan Indonesia, dan perjanjian ini diselimuti kerahasiaan. Termasuk, lisensi AstraZeneca yang dibatasi hanya pada Serum Institute of India (SII). Lebih lanjut, SII dilarang memasok negara-negara berpenghasilan menengah ke atas dan negara berpenghasilan tinggi, pasar yang paling menguntungkan bagi AstraZeneca.<sup>(11)</sup>

9. MSF Report, "WTO Covid-19 TRIPS Waiver Proposal: Myths, realities and an opportunity for governments to protect access to lifesaving medical tools in a pandemic", hal.4, 2020, diakses dari website MSF.
10. <https://igj.or.id/diplomasi-vaksin-covid-19-indonesia-tantangan-akses-publik-atas-vaksin-dan-layanan-kesehatan-berkeadilan/>
11. MSF Report, "WTO Covid-19 TRIPS Waiver Proposal: Myths, realities and an opportunity for governments to protect access to lifesaving medical tools in a pandemic", hal.4,2020, diakses dari website MSF.



Bahkan, meskipun telah menerima setidaknya US \$ 70,5 juta dana publik untuk mengembangkan Remdesivir (salah satu kandidat obat untuk pengobatan COVID-19), perusahaan farmasi Gilead telah

Gambar 4



Sumber: <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02450-x>

menandatangani kesepakatan bilateral rahasia dengan beberapa perusahaan generik pilihannya yang mengecualikan hampir setengah dari populasi dunia dari wilayah lisensinya.<sup>(12)</sup>

Praktek lisensi oleh perusahaan farmasi ini juga pada akhirnya membatasi kapasitas produksi manufaktur dengan hanya memilih secara eksklusif produsen mana saja dan dinegara mana saja yang bisa memproduksi vaksin. Terbukti, seberapa besar produksi vaksin hanya bisa diproduksi di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India (Lihat gambar 4). Tentu, hal ini akan kembali menghambat produksi vaksin dengan skala besar dalam rangka memenuhi pasokan vaksin diseluruh dunia. Apalagi, banyak yang meragukan bahwa di tahun 2021 pasokan dunia dapat dipenuhi sesuai dengan janji perusahaan farmasi.

Airfinity, firma analisis pasar ilmu hayati di London, saat ini memproyeksikan bahwa hanya satu miliar dosis akan tersedia pada kuartal keempat tahun 2021, dan ini jauh dari angka pasokan yang dibutuhkan. Dan CEPI sendiri memastikan hingga akhir 2021, baru 3.<sup>(13)</sup>

12. MSF Briefing Document, : India and South Africa proposal for WTO waiver from intellectual property protections for COVID-19-related medical technologies", 18 November 2020

13. <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02450-x>



ISSUE 2

# PENGADAAN VAKSIN DI INDONESIA

Di penghujung tahun 2020, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah memesan sebanyak 329,5 juta dosis vaksin kepada lima perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 juta dosis vaksin berasal dari Sinovac. Rencananya, pemerintah akan menambah 122,5 juta dosis vaksin jenis ini. Kemudian, 50 juta dosis vaksin dipesan dari Novavax, 54 juta dosis vaksin dari Covax/GAVI, 50 juta dosis vaksin dari AstraZeneca, dan 50 juta dosis vaksin dari Pfizer.<sup>(14)</sup>

Ditahap pertama, 3 juta dosis vaksin Sinovac telah dikirim dan dipakai untuk vaksinasi tahap pertama di Indonesia untuk kelompok yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, yakni 1319 juta tenaga kesehatan, termasuk asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), dan 195 ribu petugas pelayan publik esensial sebagai garda terdepan seperti TNI Polri, Satpol PP, petugas pelayan publik transportasi (petugas bandara, pelabuhan, KA, MRT, dll) termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia.<sup>(15)</sup> Vaksinasi tahap pertama dilakukan pada Januari-April 2021 dengan dua kali penyuntikan.

Vaksin Sinovac dipesan oleh Pemerintah Indonesia dengan model kerjasama bisnis antara Sinovac dengan PT.Biofarma. Kerjasama yang dilakukan antara dua perusahaan ini adalah dengan memastikan supply bahan baku vaksin dari sinovac untuk diproduksi oleh BioFarma dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia. Disebutkan bahwa Sinovac berkomitmen untuk menyediakan supply bulk vaccine hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020-Maret 2021. Kemudian dilanjutkan dengan komitmen Sinovac untuk mensuplai bulk vaccine untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun 2021.<sup>(16)</sup>

Untuk pemesanan vaksin dari Pfizer, AstraZeneca ataupun Novavax akan masuk ke kuartal ke dua tahun 2021.<sup>(17)</sup> Namun memang pemesanan vaksin Pfizer khususnya memiliki tantangan yang cukup tinggi untuk PT.BioFarma karena membutuhkan penanganan khusus. Vaksin Pfizer-BioNTech memang harus disimpan di bawah minus 70 derajat. Karena itulah membutuhkan kotak khusus agar kualitasnya tetap terjaga. Oleh karena itu, pemesanan dengan Pfizer juga dibarengi dengan kerjasama logistic terkait dengan penyediaan storage khusus ultra low temperature freezer (*lemari pendingin khusus*).<sup>(18)</sup>

## Jaminan Pasokan & Pembatasan Ekspor Vaksin Oleh EU

Namun, belum bisa dipastikan kapan vaksin-vaksin ini akan bisa

14. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/06/12204611/jokowi-indonesia-telah-memesan-3295-juta-dosis-vaksin-covid-19?page=all>
15. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201231/1236105/mulai-hari-kemenkes-kirim-sms-blast-kelompok-prioritas-penerima-vaksin-covid-19/>
16. <https://nasional.kontan.co.id/news/bio-farma-dan-sinovac-teken-kerja-sama-ketersediaan-40-juta-dosis-vaksin-covid-19>
17. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201224175620-4-211446/vaksin-astrozeneca-novavax-pfizer-masuk-ri-kuartal-ii-2021>
18. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201230154323-37-212610/akhimya-ri-bisa-pakai-vaksin-covid-pfizer-ini-rahasianya>



segera memasok kebutuhan Indonesia. Mengingat, saat ini Pfizer dan AstraZeneca sedang menghadapi persoalan dengan Uni Eropa terkait dengan jaminan pasokan atas produksi vaksin dua perusahaan farmasi besar ini. Uni Eropa meminta agar dua perusahaan vaksin ini dapat memprioritaskan produksi dan distribusinya untuk wilayah Eropa dan memaksa keduanya untuk menandatangani perjanjian pembatasan ekspor Vaksin ke luar negara Uni Eropa. Walaupun kemudian Uni Eropa menyatakan bahwa ada pengecualian dari tindakan pembatasan ekspor khusus untuk negara-negara seperti: sumbangan vaksin untuk Covax, skema global untuk membantu negara-negara miskin; dan ekspor ke Swiss, negara-negara di Balkan barat, Norwegia, dan Afrika Utara, termasuk negara Mediterania lainnya seperti Lebanon dan Israel. <sup>(19)</sup>

Tapi sepertinya pengecualian ini tidak akan berarti sama sekali mengingat perusahaan-perusahaan farmasi tersebut memiliki masalah terkait dengan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan global hari ini. Tentu seperti dijelaskan di bagian sebelumnya, keterbatasan kapasitas produksi ini sekali lagi tidak bisa dijawab dengan cara business as usual dimana perusahaan farmasi melakukan kesepakatan bisnis dengan negara ataupun perusahaan BUMN suatu negara. Hal ini karena, kontrol produksi perusahaan farmasi melalui praktek lisensi yang dimonopoli mereka sendiri dengan perjanjian rahasia. Oleh karena itu, Nasionalisme Vaksin dan Kontrol Lisensi produksi oleh Perusahaan Farmasi akan menimbulkan dampak ketidakpastian atas jaminan pasokan vaksin yang telah dipesan oleh Pemerintah Indonesia untuk program vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia.

### **Vaksin Gratis, Mampukah?**

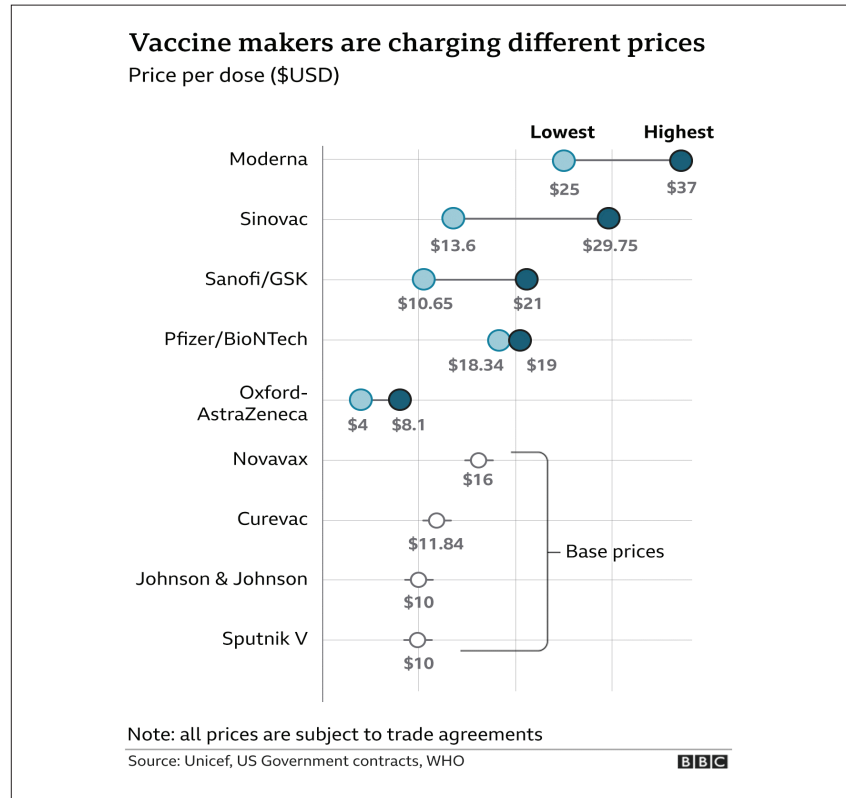
Berkaca pada persoalan nasionalisme vaksin yang terjadi saat ini, tentu persoalan kemampuan suatu negara untuk dapat membeli dan menyediakan vaksin untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya menjadi isu yang sangat penting untuk direspon. Sebelumnya, perbedaan harga pembelian oleh Afrika Selatan yang nilainya dua kali lebih mahal dari harga yang dibeli Uni Eropa dari AstraZeneca telah menjadi preseden buruk ditengah isu kemanusiaan hari ini. (Lihat Gambar 5 Perbedaan Harga Dari Perusahaan Vaksin).

Untuk Indonesia sendiri, harga pembelian untuk 3 juta dosis vaksin Sinovac yang telah dikirim diketahui sebesar Rp.211.282,- per dosis atau setara dengan \$14 Dollar AS. Maka, paling tidak Pemerintah

19. <https://www.bbc.com/news/world-europe-55860540>

Indonesia harus menyiapkan anggaran sebesar Rp.57,1 Triliun untuk pembelian 3 juta dosis vaksin Sinovac.<sup>(20)</sup> Bahkan, untuk pengadaan vaksin sebanyak 1,2 juta dosis pada tahap selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp.18 Triliun. Anggaran tersebut diambil pemerintah dari anggaran

Gambar 5

Sumber: <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02450-x>

program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang totalnya sebesar Rp.695,2 Triliun. Dari total dana itu, sebanyak Rp35,1 triliun khusus untuk pengadaan dan distribusi vaksin.<sup>(21)</sup>

**Meskipun begitu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Vaksin akan diberikan secara gratis kepada masyarakat.**

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah telah memproyeksi anggaran vaksin virus corona pada 2021 mencapai lebih dari Rp 74 triliun. Dan angka tersebut telah mendorong lonjakan anggaran sebesar 26,48% dari estimasi anggaran vaksin virus corona sebelumnya yakni Rp 54,4 triliun. Untuk memenuhi pengadaan vaksin hingga vaksinasi, dalam Anggaran Pendapatan

20. <https://nasional.kontan.co.id/news/vaksin-covid-19-gratis-ini-biaya-jika-harga-sinovac-rp-211282-per-dosis>

21. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201207125547-532-578883/sri-mulyani-siapkan-rp605-t-untuk-vaksin-corona-di-2021>



dan Belanja Negara (APBN) 2021 pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 18 triliun, dan Rp 36,4 triliun dari sisa dana penanganan kesehatan dalam program PEN 2020. Artinya masih ada kekurangan dana sebesar Rp 19,6 Triliun.<sup>(22)</sup>

### **Namun pertanyaannya, bagaimana Pemerintah Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sangat mahal tersebut?. Akankah ada pembebanan anggaran kepada publik?.**

Nyatanya, Pemerintah Indonesia memiliki keterbatasan kemampuan pembiayaan. Keterbatasan kemampuan negara dalam upaya memenuhi kebutuhan vaksin dan vaksinasi di Indonesia kembali lagi harus dilakukan dengan cara-cara business as usual, yakni kesepakatan bisnis dan pengikatan terhadap utang. Dilansir dari berbagai informasi media, salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk membiayai kebutuhan tersebut adalah dengan meluncurkan *Obligasi Ritel Indonesia (ORI)* seri ORI019 yang nantinya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI019 akan digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN 2021. Termasuk, untuk upaya penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi covid-19.<sup>(23)</sup>

Strategi lainnya yang juga dilakukan adalah melalui pembiayaan kepada PT.BioFarma oleh Perbankan. Hal ini mengacu pada model kerjasama bisnis yang dilakukan oleh PT.BioFarma dengan perusahaan farmasi seperti Sinovac, PfiZer, dan sebagainya. Pembiayaan perbankan ini telah dilakukan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk(BNII)– Maybank kepada PT.BioFarmayang mendapat dari pembiayaan Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia sebesar US\$ 185 Juta atau setara Rp. 2,68 Triliun. Langkah ini juga akan diikuti oleh Bank BCA yang akan memberikan fasilitas kredit kepada PT.BioFarma untuk penanganan Covid19.<sup>(24)</sup>

Bahkan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan dilakukannya vaksinasi secara mandiri yang mendorong pihak swasta untuk bisa mengambil peran secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan karyawannya. Tentu, beban biaya dari vaksinasi mandiri ini akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.<sup>(25)</sup> Namun, sekali lagi opsi vaksinasi mandiri tentu akan memunculkan anarki pasar yang sekali lagi akan berdampak terhadap pasokan dan diskriminasi pasar. Padahal,

22. <https://nasional.kontan.co.id/news/menkes-sebut-sumber-anggaran-vaksin-covid-19-masih-dalam-pembahasan>
23. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210125102424-532-597931/pemerintah-luncurkan-ori019-untuk-biaya-vaksin-covid-19>
24. <https://keuangan.kontan.co.id/news/sejumlah-bank-bersiap-kururkan-pembiayaan-pengadaan-vaksin-covid-19>
25. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/18323741/pemerintah-pertimbangkan-vaksinasi-mandiri-oleh-perusahaan-asal-tidak-bebani?page=all>

situasi pandemic saat ini mekanisme pasar tidak bisa diterapkan, dan seharusnya negara mengambil alih segala kontrol pasokan, harga, dan distribusi dengan menghilangkan beban biaya kepada rakyat.

Pada level yang lain, pembiayaan Covid19 juga disiapkan dengan skema utang yang akan digelontorkan oleh Bank Dunia dan IMF. Tahun lalu, Bank Dunia menyetujui pembiayaan senilai US\$12 miliar atau setara Rp176,76 triliun bagi negara-negara berkembang untuk membiayai pembelian dan distribusi vaksin, tes, dan perawatan Covid-19. Dalam melaksanakan program tersebut, Bank Dunia akan mendukung upaya multilateral yang saat ini dipimpin oleh WHO dan COVAX.<sup>26</sup> Di Indonesia sendiri, Bank Dunia telah menyetujui pendanaan senilai US\$700 juta untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial maupun memperkuat sektor keuangan dalam mengatasi dampak Covid19 di Indonesia (*Lihat Box1*). Beban pembiayaan ini

Box 1

### PINJAMAN BANK DUNIA UNTUK INDONESIA

- Proyek pertama yang disetujui untuk pendanaan ini adalah pembiayaan tambahan untuk asistensi program reformasi sosial senilai US\$400 juta. Bantuan pembiayaan ini dapat membantu mengatasi pandemic Covid19 yang berdampak besar pada kaum miskin dan rentan serta pekerja informal. Pendanaan tersebut juga diharapkan dapat membantu penambahan dana darurat sementara bagi 10 juta penerima PKH untuk menjaga tingkat kesejahteraan sosial.
- Proyek kedua dari pembiayaan yang disetujui ini adalah pinjaman untuk kebijakan reformasi dalam pengembangan sektor finansial guna mengatasi dampak covid19 untuk Indonesia sebesar US\$300 juta. Pendanaan tambahan tersebut akan membantu pemerintah menutupi keterbatasan keuangan (baca: keterbatasan APBN) yang tidak terduga yang muncul akibat pandemic, dan membantu mengatasi krisis Covid19.

Sumber: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200516/9/1241563/atasi-covid-19-bank-dunia-guyur-us700-juta-bagi-indonesia.-untuk-apa-saja>

tentunya akan terasa lebih ringan jika harga vaksin yang tersedia bukanlah atas dasar kesepakatan bisnis. Hal ini memunculkan hambatan pembiayaan besar untuk negara-negara berkembang dan miskin, yang sekali lagi harus bergantung pada pembiayaan utang, dan secara tidak langsung akan berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Untuk itu, desakan kelompok masyarakat sipil di dunia tentang Vaksin harus menjadi barang publik, harus dilakukan dengan kerjasama yang bersifat gotong royong atas nama kemanusiaan dan bukan sebagai komoditas bisnis yang bersifat komersil.

26. <https://www.wartaekonomi.co.id/read309117/bank-dunia-siapkan-pinjaman-vaksin-corona-senilai-rp176-triliuncorona-di-2021>

IGJ

Indonesia  
Untuk  
Keadilan  
GlobalIndonesia  
For  
Global  
Justice

ISSUE 3

**AKSES VAKSIN  
UNTUK SEMUA  
ORANG****(#PEOPLESVACCINES)**

Sejak dimulainya pandemi ini, perusahaan farmasi terus menggunakan pendekatan 'bisnis seperti biasa' baik dengan mempertahankan kontrol yang ketat atas hak kekayaan intelektual mereka atau dengan mengejar kesepakatan komersial rahasia dan monopoli dan mengecualikan negara-negara yang sangat terpengaruh oleh COVID-19. Industri farmasi secara keseluruhan juga telah memilih untuk tidak terlibat dengan inisiatif Pool Akses Teknologi (C-TAP) COVID-19 WHO yang bertujuan untuk mendorong kontribusi sukarela IP, teknologi, dan data untuk mendukung pembagian global dan peningkatan skala manufaktur dan pasokan teknologi kesehatan COVID-19.

Untuk membuka akses terhadap vaksin secara berkeadilan tanpa terkecuali, dibutuhkan komitmen kuat yang mengedepankan pengutamaan atas hidup manusia ketimbang profit. Oleh karena itu, segala bentuk pendekatan *business as usual* harus dihentikan, khususnya monopoli kekayaan intelektual. Dalam rangka memastikan terbukanya akses berkeadilan terhadap vaksin dan medical treatment terkait covid19, diperlukan kepastian pasokan produksi untuk memenuhi permintaan seluruh negara di dunia secara merata dengan harga yang murah. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan membuka kompetisi produksi dan harga.

**Hapuskan Kewajiban TRIPS**

Monopoli Kekayaan Intelektual telah menghambat peningkatan produksi yang diperlukan untuk memastikan akses global yang adil kepada vaksin dan produk kesehatan lainnya. Kontrol monopoli seperti itu menghambat peningkatan produksi yang diperlukan untuk memastikan akses global yang adil ke produk-produk ini untuk mengakhiri pandemi. Membela perlindungan monopoli HaKI juga bertentangan dengan seruan agar obat dan vaksin COVID-19 diperlakukan sebagai barang publik global.

Walaupun dalam TRIPS Agreement di WTO telah diatur mengenai penggunaan TRIPS Fleksibilitas untuk kepentingan kesehatan publik, seperti hak negara untuk mengeluarkan lisensi wajib untuk mengganti paten obat, hak untuk memperkenalkan sistem oposisi paten pra-hibah dan kriteria paten yang ketat serta kebijaksanaan untuk tidak mengizinkan eksklusivitas atas data pengujian. Tetapi cara itu tidak cukup untuk mengatasi



Monopoli Kekayaan Intelektual telah menghambat peningkatan produksi yang diperlukan untuk memastikan akses global yang adil kepada vaksin dan produk kesehatan lainnya.



pandemic covid19 yang ada hari ini. Pandemi adalah situasi khusus yang juga harus direspon secara khusus.

Penerapan TRIPS Fleksibilitas membutuhkan proses yang amat panjang dan birokratis, tentu tidak akan bisa secara efektif merespon penanganan pandemic secara cepat. Dan saat ini yang dibutuhkan adalah Pengabaian aturan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya yang diatur di dalam TRIPS Agreement WTO. Hanya dengan cara itulah dunia bisa memberikan akses universal dan terjangkau untuk perawatan medis yang sangat penting tanpa kekuatan monopoli pasar.

### **TRIPS Waiver Sekarang Juga**

Proposal ini diajukan oleh India dan Afrika Selatan pada Oktober 2020 di WTO untuk memperbolehkan semua negara untuk memilih tidak memberikan dan atau tidak menegakkan aturan HKI (paten, hak cipta dan hak terkait, desain industry, protection of undisclosed information) terkait dengan obat, tes diagnostic, vaksin dan teknologi lain terkait dengan COVID-19 selama pandemic berlangsung, sampai 'imunitas global' tercapai. TRIPs Waiver menjadi jalan untuk menciptakan akses vaksin yang lebih luas, bukan hanya vaksin tetapi juga obat-obatan dan peralatan yang diperlukan selama pandemi berlangsung.

Pengabaian TRIPS Agreement (disebut dengan TRIPS Waiver) yang diusulkan hanya akan berlaku untuk COVID-19. Ini akan membuka memberi ruang kebijakan yang luas kepada seluruh negara didunia untuk berkolaborasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D), peningkatan skala produksi dan manufaktur untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh dunia, termasuk memasok alat COVID-19. Saat ini, pembahasan secara kritis tengah berlangsung di TRIPS Council WTO untuk memuluskan kesepakatan TRIPS Waiver yang dibutuhkan saat pandemic hari ini. Keputusan akan diambil pada saat Konferensi WTO ke 12 di tahun 2021. Namun, sekelompok kecil negara seperti, Australia, Brasil, Kanada, Uni Eropa, Jepang, Norwegia, Swiss, Inggris, dan AS, masih menahan dukungannya terhadap proposal tersebut mengingat mereka secara tradisional adalah pendukung kepentingan perusahaan farmasi melalui sistem monopoli HakI.



IGJ

Indonesia  
Untuk  
Keadilan  
GlobalIndonesia  
For  
Global  
Justice

## KESIMPULAN

Oleh karena itu, dalam memastikan adanya akses yang berkeadilan terhadap vaksin, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menangani covid19 hingga imunitas global tercapai, perlu didesak kepada Pemerintah Indonesia dan seluruh negara di dunia untuk segera:

1. Menghentikan Monopoli HaKI dan praktek komersil atas vaksin, dan obat-obatan termasuk alat-alat kesehatan yang dibutuhkan publik di masa pandemic covid19.
2. Menjadikan vaksin, obat-batan, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan publik dimasa pandemic covid19 sebagai barang publik.
3. Negara harus hadir dan menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak ekonomi dan hak kesehatan seluruh masyarakat Indonesia tanpa menyerahkan kewajiban tersebut kepada sektor swasta.
4. Menghentikan Praktek Nasionalisme Vaksin yang menimbulkan ketidakadilan akses atas produksi, distribusi, dan harga bagi negara-negara berkembang dan miskin.
5. Membuka transparansi informasi kepada publik atas perjanjian kerjasamayang dibuat oleh negara dan perusahaan farmasi, termasuk kerjasama bisnis yang dilakukan oleh perusahaan farmasi, dalam rangka memastikan adanya jaminan akses yang berkeadilan atas produksi, distribusi, dan harga bagi negara-negara berkembang dan miskin.
6. Mendukung dan menyepakati proposal TRIPS Waiver dalam pembahasan di WTO dalam rangka memastikan adanya akses yang berkeadilan atas vaksin, obat-obatan, teknologi, dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dunia dalam masa pandemic covid19.